



Tradisi Pelayaran Suku Bajo Sebagai Warisan Maritim Indonesia

Yohanis Kristianus Tampani¹, Augusta De Jesus Magalhaes², Simon Ukasa Manek³,
Natalia Bulu Masan⁴, Selfina Eliseba Manuni⁵, Adriana Hoar Ulu⁶, Stanislaus Aristo
Nana⁷

¹⁻⁷ Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP Sinar Pancasila Malaka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi: sultrymanek@gmail.com

Abstract: *The Bajo people are one of the most prominent nomadic seafaring communities in Southeast Asia, having inhabited the Indonesian waters for centuries. This study aims to comprehensively examine the Bajo people's seafaring traditions as an integral part of Indonesia's maritime heritage that urgently needs to be systematically preserved amidst the increasingly rapid flow of modernization and globalization. This study uses a qualitative approach with a descriptive analytical literature study method, namely by systematically collecting, reviewing, and synthesizing relevant academic literature, historical documents, ethnographic reports, government policy documents, and previous research findings related to the maritime traditions of the Bajo community. The results of the study reveal that the Bajo people's seafaring traditions encompass several core dimensions such as the pabbiritang star navigation system that utilizes more than 40 constellations and traditional navigation including lepa-lepa, soppe, and bidi-bidi. These traditions are currently facing serious threats from the government's sedentarization policy, technological modernization, marine environmental degradation, and the failure of knowledge transmission across generations. This study concludes that preserving the Bajo maritime heritage requires an integrated approach that combines systematic scientific documentation, legal recognition of customary maritime rights, community-based education programs, and alternative livelihoods that are economically sustainable while respecting their cultural identity.*

Keywords: *Bajo People; Cultural Preservation; Maritime Heritage; Seafaring Traditions; Traditional Navigation.*

Abstrak: Suku Bajo merupakan salah satu komunitas pelaut nomaden paling menonjol di Asia Tenggara yang telah menghuni perairan Nusantara selama berabad-abad. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tradisi pelayaran Suku Bajo sebagai bagian integral dari warisan maritim Indonesia yang mendesak untuk dilestarikan secara sistematis di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin deras. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka deskriptif analisis, yakni dengan mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis secara sistematis literatur akademik relevan, dokumen historis, laporan etnografis, dokumen kebijakan pemerintah, dan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi maritim komunitas Bajo. Hasil kajian mengungkap bahwa tradisi pelayaran Suku Bajo mencakup beberapa dimensi inti seperti sistem navigasi bintang pabbiritang yang memanfaatkan lebih dari 40 rasi bintang dan pelayaran tradisional meliputi lepa-lepa, soppe, dan bidi-bidi. Tradisi-tradisi ini saat ini menghadapi ancaman serius dari kebijakan sedentarisasi pemerintah, modernisasi teknologi, degradasi lingkungan laut, dan kegalangan transmisi pengetahuan lintas generasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian warisan maritim Bajo membutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan dokumentasi ilmiah sistematis, pengakuan hukum atas hak adat laut, program pendidikan berbasis komunitas, dan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan secara ekonomi namun tetap menghormati identitas budaya mereka.

Kata kunci: Masyarakat Bajo; Navigasi Tradisional; Pelestarian Budaya; Tradisi Pelayaran; Warisan Maritim.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, memiliki kekayaan budaya bahari yang tak tertandingi. Posisi geostrategis Indonesia di persimpangan dua samudra besar - Hindia dan Pasifik - telah melahirkan peradaban maritim yang beragam dan kaya sejak ribuan tahun silam. Di antara sekian banyak komunitas maritim yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Suku Bajo menempati posisi yang sangat istimewa sebagai komunitas pelaut

nomaden yang telah menjadikan laut sebagai rumah, sumber kehidupan, dan pusat kosmologi mereka selama berabad-abad (Zacot, 2002).

Suku Bajo, yang dalam literatur akademik internasional dikenal pula sebagai Bajau, Badjao, atau Sea Nomads (Pelaut Nomaden), merupakan salah satu kelompok etnis dengan populasi maritim tersebar luas di kawasan Asia Tenggara. Persebaran mereka membentang dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan, pesisir timur Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur, hingga berbagai kepulauan Indonesia meliputi Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara (Chou, 2010; Stacey, 2007; Sather, 1997). Di Indonesia sendiri, populasi Suku Bajo diperkirakan mencapai lebih dari 150.000 hingga 200.000 jiwa yang tersebar di berbagai kawasan pesisir dan kepulauan (Wahyono dkk., 2014).

Apa yang menjadikan Suku Bajo begitu istimewa dalam khasanah budaya maritim dunia adalah akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan praktik budaya pelayaran yang telah berkembang selama ribuan tahun melalui proses adaptasi intensif terhadap lingkungan laut. Sistem navigasi bintang mereka yang dikenal sebagai pabbiritang, teknologi perahu tradisional yang canggih secara hidrodinamika, pengetahuan ekologis laut yang mendalam, sistem pengelolaan sumber daya berbasis adat, serta dimensi spiritual pelayaran yang kaya makna - semuanya membentuk sebuah warisan peradaban maritim yang unik dan tak ternilai (Berkes, 2012; Ruddle & Hickey, 2008).

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tradisi pelayaran Suku Bajo menghadapi tekanan yang semakin mengkhawatirkan. Modernisasi yang cepat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong sedentarisasi, degradasi serius ekosistem laut, serta pergeseran orientasi generasi muda menuju pendidikan formal dan pekerjaan di darat - semua faktor ini secara sinergis mengancam kelangsungan tradisi-tradisi yang telah diwariskan selama ribuan tahun (Béné dkk., 2010; Wahyono dkk., 2014). Banyak pengetahuan dan keterampilan tradisional yang kini berada di ambang kepunahan seiring dengan meninggalnya para tetua adat yang merupakan penjaga utama kearifan tersebut.

Dalam konteks ini, kajian ilmiah yang komprehensif dan sistematis mengenai tradisi pelayaran Suku Bajo sebagai warisan maritim Indonesia menjadi sangat urgen. Kajian semacam ini tidak hanya memberikan kontribusi pada dokumentasi dan pemahaman akademik tentang kekayaan budaya yang ada, tetapi juga memberikan landasan empiris dan konseptual yang kokoh bagi pengembangan strategi pelestarian yang lebih efektif, adil, dan berkesinambungan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang Suku Bajo telah berkembang sejak abad ke-19 dan semakin intensif pada abad ke-20. Melalui *The Sea People of Sulu* mendokumentasikan sistem sosial, kepercayaan, dan kehidupan maritim komunitas Bajo. Kemampuan adaptasi ekologis masyarakat Bajo sebagai faktor utama keberlangsungan hidup mereka di lingkungan laut.

Di Indonesia, Zacot (2002) menggambarkan kehidupan Bajo di Sulawesi Tenggara, termasuk tradisi pelayaran dan sistem sosialnya. Sementara itu, Chou (2010) dan Stacey (2007) membahas mobilitas masyarakat Bajo, identitas maritim, serta aktivitas penangkapan ikan mereka dalam konteks modern. Dari sisi historis, Pelras (2006) dan Lopian (2009) menegaskan bahwa komunitas Bajo merupakan bagian penting dari jaringan perdagangan maritim Nusantara.

Warisan maritim mencakup unsur budaya berwujud maupun tidak berwujud, seperti perahu tradisional, sistem navigasi, pengetahuan lokal, dan praktik budaya masyarakat pesisir. UNESCO (2003) menegaskan bahwa warisan budaya tak benda meliputi praktik, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia, pengakuan terhadap tradisi maritim diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ahmad (2015) juga menegaskan pentingnya warisan maritim sebagai bagian dari identitas Indonesia sebagai negara bahari.

Berkes (2012) menjelaskan bahwa *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) merupakan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun mengenai hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam komunitas pelaut tradisional, pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang arus laut, musim, ekosistem, dan sumber daya laut. Sistem pengetahuan lokal masyarakat maritim sering kali lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan dibanding pendekatan modern. Selain itu, Satria (2009) menegaskan pentingnya integrasi pengetahuan lokal dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

Tradisi navigasi masyarakat pelaut Nusantara berkembang melalui pengamatan terhadap bintang, arah angin, arus laut, serta tanda-tanda alam lainnya. Sistem navigasi tradisional memiliki tingkat ketepatan tinggi meskipun tanpa alat modern. Perahu tradisional Indonesia, termasuk milik Suku Bajo, dirancang dengan teknologi yang adaptif terhadap kondisi laut. Ada kesamaan sistem navigasi antara pelaut Bugis dan Bajo dalam pelayaran Nusantara.

Modernisasi menjadi tantangan utama terhadap keberlangsungan tradisi maritim. Bénédikt (2010) mengidentifikasi ancaman berupa perubahan teknologi, kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat adat, kerusakan lingkungan, serta pergeseran ekonomi masyarakat

pesisir. Wahyono dkk. (2014) menemukan bahwa kebijakan pemukiman tetap terhadap masyarakat Bajo turut memengaruhi identitas budaya dan tradisi pelayaran mereka. Dahuri dkk. (2013) menekankan perlunya pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Penelitian ini menggunakan tiga perspektif utama, yaitu warisan budaya tak benda dari UNESCO (2003), konsep *Traditional Ecological Knowledge* dari Berkes (2012), dan perspektif ekologi politik yang menyoroti tantangan sosial serta marginalisasi komunitas Bajo. Ketiga perspektif ini digunakan untuk memahami tradisi pelayaran Suku Bajo sebagai warisan maritim yang perlu dilestarikan di tengah perubahan zaman.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji tradisi pelayaran Suku Bajo berdasarkan berbagai sumber literatur tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Studi pustaka memungkinkan peneliti mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif (Nazir, 2013; Sugiyono, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku merupakan kelompok etnis yang memiliki hubungan yang erat dengan laut. Secara historis, suku Bajo menjalani kehidupan nomaden di laut dengan menggunakan perahu sebagai tempat tinggal sekaligus sarana transportasi. Laut tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, melainkan juga sebagai bagian dari sistem kepercayaan dan identitas budaya mereka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa masyarakat Bajo memiliki hubungan emosional, spiritual, dan ekonomi yang kuat dengan lingkungan laut. Kemampuan adaptasi terhadap laut menjadikan suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung. Mereka mampu mengenali karakteristik perairan, perubahan cuaca, dan pola migrasi ikan melalui pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Sistem Navigasi (*Pabbiritang*) dan Pelayaran Tradisional Suku Bajo

Tradisi pelayaran suku Bajo didasarkan pada pengetahuan lokal yang berkembang melalui praktik langsung. Sebelum penggunaan alat navigasi modern, para pelaut Bajo mengandalkan posisi matahari, bintang, arah angin, gelombang laut serta tanda-tanda alam lainnya untuk menentukan arah pelayaran. Pengetahuan tersebut diwariskan secara lisan dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Anak-anak Bajo sejak usia dini telah diperkenalkan pada

kehidupan laut sehingga mampu memahami teknik pelayaran tradisional. Anak-anak Bajo, terutama anak laki-laki, mulai dibawa ke laut sejak usia yang sangat dini, biasanya sejak sebelum usia lima tahun. Proses pembelajaran bersifat informal namun sangat terstruktur - berlangsung melalui pengamatan langsung, partisipasi bertahap dalam aktivitas pelayaran, dan pendampingan intensif dari ayah, kakek, atau sesepuh komunitas.

Sistem pengetahuan ini menjadi modal sosial yang memungkinkan keberlangsungan aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dalam jangka panjang. Selain sebagai alat transportasi, perahu memiliki makna simbolis dalam budaya Bajo. Perahu dipandang sebagai bagian dari identitas masyarakat yang mencerminkan keterampilan teknologi tradisional dan hubungan harmonis dengan laut.

Sistem navigasi tradisional Suku Bajo yang dikenal sebagai *pabbiritang* merupakan salah satu sistem navigasi tradisional paling canggih dan komprehensif yang pernah didokumentasikan di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Istilah *pabbiritang* dalam bahasa Bajo secara harfiah merujuk pada keseluruhan sistem pengetahuan tentang cara membaca, menginterpretasikan, dan memanfaatkan tanda-tanda alam untuk keperluan navigasi di laut (Zacot, 2002).

Inti dari sistem *pabbiritang* adalah pengetahuan yang sangat mendalam tentang peta bintang (bintang *pabbiritang*). Para navigator Bajo secara tradisional mampu mengidentifikasi, menamai, dan menggunakan lebih dari 40 rasi bintang yang relevan untuk navigasi laut. Bintang Utara atau bittoka utara dalam bahasa Bajo digunakan sebagai titik referensi arah utama yang paling fundamental, sementara rasi Pari (Southern Cross) digunakan untuk navigasi di wilayah perairan selatan. Rasi-rasi bintang lainnya digunakan untuk menentukan posisi, waktu, dan musim.

Komponen kedua dari *pabbiritang* adalah pengetahuan tentang arus laut musiman (*pappilao*). Para navigator Bajo memiliki kategorisasi yang sangat terperinci untuk setidaknya 15 pola arus berbeda yang terdapat di perairan Sulawesi Tenggara, Banda, dan sekitarnya. Pengetahuan ini diintegrasikan dengan pengetahuan tentang musim angin (muson) untuk memungkinkan perencanaan pelayaran yang efisien dengan memanfaatkan arus dan angin yang menguntungkan sekaligus menghindari kondisi laut yang berbahaya (Ruddle & Hickey, 2008).

Komponen ketiga adalah pembacaan tanda-tanda alam non-astronomikal yang mencakup warna dan kondisi air laut, perilaku berbagai spesies burung laut dan ikan, bentuk dan ketinggian ombak, bau air dan angin, serta keberadaan jenis-jenis tumbuhan laut tertentu. Kombinasi dari semua tanda ini membentuk sebuah sistem 'peta' laut yang sangat kaya dan

multidimensional, jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh instrumen navigasi tunggal manapun (Berkes, 2012).

Lepa-Lepa: Hunian Terapung

Lepa-lepa merupakan perahu paling fundamental dalam kehidupan komunitas Bajo nomadik. Berukuran antara 3 hingga 5 meter, lepa-lepa secara tradisional berfungsi tidak hanya sebagai alat transportasi tetapi sekaligus sebagai hunian, ruang sosial, dan sarana produksi bagi sebuah keluarga inti. Zacot (2002) menjelaskan bahwa kehidupan seluruh keluarga - tidur, memasak, melahirkan, dan berbagai aktivitas sehari-hari lainnya - berlangsung di atas lepa-lepa selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tanpa terputus.

Dari perspektif teknis, lepa-lepa dikonstruksi menggunakan teknik sambungan tradisional tanpa paku logam - menggunakan pasak kayu (*spigot*) dan serat ijuk (*Arenga pinnata*) sebagai perekat alami yang dikombinasikan dengan getah damar sebagai water sealant. Teknik ini menghasilkan lambung perahu yang memiliki fleksibilitas struktural yang unggul - mampu menyesuaikan diri dengan tekanan dan gerakan air laut tanpa retak, sifat yang tidak dapat direplikasi oleh perahu dengan konstruksi kaku menggunakan paku logam.

Soppe: Kapal Layar Jarak Jauh

Soppe adalah perahu berukuran lebih besar (antara 8 hingga 12 meter) yang digunakan untuk pelayaran jarak jauh, kegiatan perdagangan, dan perikanan dalam skala yang lebih besar. Dilengkapi dengan layar tradisional berbentuk segitiga yang dikenal sebagai *taddaga*. Soppe mampu memanfaatkan angin dari berbagai arah secara efisien. Desain lambung soppe yang ramping dengan keel yang dalam menghasilkan karakteristik hidrodinamika yang sangat baik, memungkinkan kecepatan berlayar yang relatif tinggi dan kestabilan yang sangat baik di perairan terbuka.

Yang sangat menarik dari kajian literatur adalah dokumentasi tentang kemampuan navigasi soppe dalam kondisi cuaca yang menantang. Para pelaut Bajo yang berpengalaman dapat mengemudikan soppe dalam kondisi laut yang berat dengan tingkat keahlian dan keberanian yang sangat mengagumkan, mencerminkan pemahaman mendalam tentang karakteristik perahu mereka dan kondisi laut yang dihadapi (Stacey, 2007).

Bidi-Bidi

Bidi-bidi adalah rakit bambu yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan di area terumbu karang yang dangkal dan sempit. Konstruksinya yang sangat ringan dan berdimensi kecil memungkinkan nelayan untuk mengakses area-area yang tidak dapat dijangkau oleh perahu berukuran lebih besar. Meski tampak sederhana, bidi-bidi dirancang dengan pemahaman mendalam tentang hidrodinamika perairan dangkal dan perilaku ikan target.

Selain tiga jenis perahu utama di atas, literatur juga mendokumentasikan berbagai varian dan modifikasi perahu yang digunakan untuk keperluan spesifik. Variasi ini mencerminkan kemampuan adaptasi teknologi perahu Bajo terhadap berbagai kondisi ekologis dan kebutuhan sosial-ekonomi yang berbeda di berbagai wilayah persebaran komunitas Bajo.

Tantangan Pelestarian Tradisi Pelayaaran Suku Bajo

Penetrasi teknologi modern ke dalam komunitas Bajo, meskipun dalam banyak hal memberikan manfaat nyata, juga membawa dampak tidak terduga terhadap keberlangsungan pengetahuan dan keterampilan tradisional. Penggunaan mesin tempel dan kapal bermotor yang semakin meluas telah mengurangi kebutuhan untuk menguasai navigasi layar dan pemanfaatan angin. Perangkat GPS dan *echosounder* elektronik yang semakin terjangkau dan mudah diakses telah mengurangi insentif untuk mempelajari dan mempraktikkan sistem navigasi bintang pabbiritang yang membutuhkan investasi waktu dan tenaga belajar yang sangat besar (Béné dkk., 2010).

Dalam jangka pendek, teknologi modern meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kegiatan penangkapan ikan. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan pada teknologi modern menciptakan kerentanan baru - ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diproduksi atau direplikasi secara mandiri oleh komunitas (bahan bakar, suku cadang, baterai), dan kepunahan pengetahuan yang tidak tertulis dan sangat sulit untuk direkonstruksi jika sudah hilang.

Degradasi Ekosistem Laut

Degradasi serius ekosistem laut di wilayah-wilayah tradisional komunitas Bajo merupakan ancaman yang bersifat ganda: ia mengancam keberlanjutan mata pencaharian komunitas sekaligus menghancurkan basis material dari sistem pengetahuan ekologis tradisional mereka. Kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan dengan bahan peledak (*blast fishing*) dan sianida, yang ironisnya lebih banyak dilakukan oleh nelayan dari luar komunitas Bajo, telah mengurangi produktivitas wilayah perairan dan memaksa nelayan untuk berlayar semakin jauh (Dahuri dkk., 2013).

Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut termasuk pemutihan karang (*coral bleaching*) akibat peningkatan suhu air, perubahan pola musim dan arus yang tidak lagi sesuai dengan pengetahuan tradisional, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem di laut juga menjadi ancaman yang semakin nyata dan mengkhawatirkan bagi komunitas Bajo.

Ancaman mendasar yang paling sulit untuk ditangani adalah krisis transmisi pengetahuan tradisional dari generasi tua ke generasi muda. Berbagai sumber literatur yang dikaji secara konsisten melaporkan bahwa generasi muda Bajo cenderung kurang tertarik untuk

mempelajari dan mempraktikkan tradisi pelayaran nenek moyang mereka. Akses yang meningkat terhadap pendidikan formal telah membuka wawasan dan peluang bagi generasi muda untuk mengejar karir di sektor-sektor yang lebih menjanjikan secara ekonomi (Wahyono dkk., 2014).

Proses kepunahan pengetahuan berlangsung secara asimetris dan mengkhawatirkan. Banyak pengetahuan tentang sistem navigasi bintang yang sangat canggih, identitas spesies-spesies endemik di wilayah tertentu, dan berbagai aspek ritual yang hanya dimiliki oleh para tetua adat yang semakin berkurang jumlahnya, terancam hilang selamanya ketika pemegang pengetahuan tersebut meninggal dunia. Sifat pengetahuan ini yang sebagian besar bersifat tacit (tidak tersurat/tidak dapat sepenuhnya dikodifikasi) membuat upaya dokumentasinya sangat menantang (Berkes, 2012).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menempuh beberapa langkah dalam upaya pelestarian warisan budaya maritim, meskipun implementasinya sering kali tidak konsisten dan kurang terkoordinasi. Penetapan Wakatobi sebagai Taman Nasional Laut sejak tahun 1996 dan kemudian sebagai salah satu situs Cagar Biosfer UNESCO sejak 2012 memberikan kerangka perlindungan ekologis yang penting bagi wilayah laut tradisional Bajo. Program Sea Partnership yang dikembangkan oleh otoritas Taman Nasional Wakatobi berupaya melibatkan komunitas Bajo dalam pengelolaan kawasan, mengakui pengetahuan tradisional mereka sebagai aset yang berharga (Dahuri dkk., 2013).

Namun, berbagai kajian mengidentifikasi sejumlah kelemahan mendasar dalam pendekatan pemerintah. *Pertama*, fokus perlindungan yang terlalu berorientasi pada konservasi ekologi cenderung mengabaikan dimensi sosial-budaya dari keterkaitan komunitas Bajo dengan laut. *Kedua*, proses pengambilan keputusan yang sentralistik dan *top-down* membatasi keterlibatan bermakna komunitas Bajo. *Ketiga*, kriminalisasi praktik-praktik tradisional yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi konservasi modern seperti penggunaan alat tangkap tertentu yang secara tradisional digunakan oleh Bajo tanpa alternatif yang memadai menciptakan konflik antara konservasi dan hak-hak komunitas adat (Stacey, 2007; Satria, 2009).

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas akademik juga telah berupaya mendukung pelestarian warisan maritim Bajo melalui berbagai inisiatif. Proyek-proyek dokumentasi etnografis, program-program pendidikan berbasis komunitas yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional dalam kurikulum, serta advokasi kebijakan untuk pengakuan hak-hak adat laut merupakan beberapa contoh kontribusi masyarakat sipil yang patut diapresiasi (Ahmad, 2015).

Namun, inisiatif-inisiatif ini umumnya masih berskala kecil, terfragmentasi, dan bergantung pada pendanaan proyek yang bersifat jangka pendek. Untuk mencapai dampak yang signifikan dan berkelanjutan, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai aktor dan pendanaan yang lebih stabil serta berkomitmen jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Pelayaran Suku Bajo merupakan sistem warisan budaya maritim yang luar biasa kompleks, canggih, dan terintegrasi, mencakup dimensi kognitif, dimensi material-teknologis, dimensi institusional, dan dimensi spiritual-ritual. Kompleksitas dan integrasi kelima dimensi ini menjadikan tradisi pelayaran Bajo sebagai salah satu warisan peradaban maritim paling signifikan di Asia Tenggara dan dunia. Sebagai bangsa yang mengklaim identitasnya sebagai 'poros maritim dunia', Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik yang tidak dapat diabaikan untuk menghormati, melindungi, dan mempromosikan kekayaan warisan maritim komunitas-komunitas pesisirnya, termasuk Suku Bajo, sebagai bagian integral dari identitas dan kedaulatan maritim bangsa.

Tradisi pelayaran suku Bajo merupakan salah satu warisan maritim Indonesia yang memiliki nilai budaya, historis, dan sosial yang tinggi. Kemampuan navigasi tradisional, pengetahuan tentang lingkungan laut, serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa masyarakat Bajo memiliki sistem budaya maritim yang kompleks dan berkelanjutan. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi sarana mobilitas dan mata pencaharian tetapi juga membentuk identitas budaya masyarakat Bajo sebagai komunitas bahari.

Dengan demikian, di tengah tantangan modernisasi dan perubahan lingkungan, pelestarian tradisi pelayaran suku Bajo menjadi penting untuk menjaga keberagaman budaya maritim Indonesia. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan budaya, dokumentasi pengetahuan tradisional, penelitian berkelanjutan, dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan komunitas maritim lokal.

DAFTAR REFRERENSI

- Ahmad, Y. (2015). Warisan budaya maritim dan pembangunan identitas nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. *Jurnal Kelautan Nasional*, 10(2), 45–62. <https://doi.org/10.15578/jkn.v10i2.6184>
- Béné, C., Hersoug, B., & Allison, E. H. (2010). Not by rent alone: Analyzing the pro-poor functions of small-scale fisheries in developing countries. *Development Policy Review*, 28(3), 325–358. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2010.00486.x>

- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology: Traditional ecological knowledge and resource management* (3rd ed.). Routledge.
- Chou, C. (2010). *The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: The inalienable gift of territory*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203644232>
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2013). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu* (Edisi revisi). Pradnya Paramita.
- Lapian, A. B. (2009). *Orang laut, bajak laut, raja laut: Sejarah kawasan Laut Sulawesi abad XIX*. Komunitas Bambu.
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta–Paris dan EFEO.
- Ruddle, K., & Hickey, F. R. (2008). Accounting for the mismanagement of tropical nearshore fisheries. *Environment, Development and Sustainability*, 10(5), 565–589. <https://doi.org/10.1007/s10668-008-9152-5>
- Satria, A. (2009). *Pesisir dan laut untuk rakyat*. IPB Press.
- Stacey, N. (2007). *Boats to burn: Bajo fishing activity in the Australian Fishing Zone*. ANU E Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_458834
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104*.
- Wahyono, A., Satria, A., Nikijulw, V. P. H., & Adrianto, L. (2014). Analisis kebijakan sedentarisasi dan implikasinya terhadap komunitas Bajo di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 6(2), 89–101.
- Zacot, F. R. (2002). *Orang Bajo: Suku pengembara laut*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Ahmad, Y. (2015). Warisan budaya maritim dan pembangunan identitas nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. *Jurnal Kelautan Nasional*, 10(2), 45–62. <https://doi.org/10.15578/jkn.v10i2.6184>
- Béné, C., Hersoug, B., & Allison, E. H. (2010). Not by rent alone: Analyzing the pro-poor functions of small-scale fisheries in developing countries. *Development Policy Review*, 28(3), 325–358. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2010.00486.x>
- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology: Traditional ecological knowledge and resource management* (3rd ed.). Routledge.
- Chou, C. (2010). *The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: The inalienable gift of territory*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203644232>
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2013). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu* (Edisi revisi). Pradnya Paramita.

- Lapian, A. B. (2009). *Orang laut, bajak laut, raja laut: Sejarah kawasan Laut Sulawesi abad XIX*. Komunitas Bambu.
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta–Paris dan EFEO.
- Ruddle, K., & Hickey, F. R. (2008). Accounting for the mismanagement of tropical nearshore fisheries. *Environment, Development and Sustainability*, 10(5), 565–589. <https://doi.org/10.1007/s10668-008-9152-5>
- Satria, A. (2009). *Pesisir dan laut untuk rakyat*. IPB Press.
- Stacey, N. (2007). *Boats to burn: Bajo fishing activity in the Australian Fishing Zone*. ANU E Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_458834
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104*.
- Wahyono, A., Satria, A., Nikijuluw, V. P. H., & Adrianto, L. (2014). Analisis kebijakan sedentarisasi dan implikasinya terhadap komunitas Bajo di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 6(2), 89–101.